

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani. *Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsive (catatan atas Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan)*. Konstitusi Pers. Jakarta. 2013
- Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Public*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- Angger Sigit Pramukti. *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*. Pustaka Yustika. Yogyakarta. 2016. hlm 17
- Arif Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : / Kepala BAPENAS* “,diakses dari https:jdi.bappenas.go.id/data/file/workshop_peraturan_kebijakan_di_kementerian_ppn_bappenas.pdf.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 92
- Bohari. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 1992. hlm 3.
- BPOM. 2023. *Laporan Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi 2023*. Balai POM Jambi.
- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Erlangga. Jakarta. 2003. hlm 100.
- Faisal Abdullah. *Jalan Terjal, Governance (Prinsip, Konsep dan Tantangan dalam Negara Hukum)*. Pukap-Indonesia. Makassar. 2009
- Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta 2001. hlm 245
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (Mirra Buana Media : Yogyakarta, 2020), hlm. 62
- Jum Anggraini. *Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu*. Yogyakarta. 2012. hlm 78.
- Juniarso, R & Achmad, S. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa. Bandung. 2008. hlm 105.
- Kansil, C.S.T. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001. hlm 4.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2014), hlm. 6

- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung. 2009. hlm 8.
- Philipipus M Hdjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum dan Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta. Universitas Trisakti, 2012). hlm. 20
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 78
- Piran Wroatmodjo. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Lembaga Administrasi Negara*. Grafindo Media Pratama. Bandung. 2004.
- Saiful Anwar. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. Jakarta. 2004. hlm 127
- Saripudin. *Tata Negara*. Grafindo Media Pratama. Bandung. 2004. hlm 83.
- Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2021). hlm.8
- Siagian P Sondang. *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung. Jakarta. 2000. hlm 135.
- Soewarno Hadayaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta 1981, hlm.145
- Sujamto. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Sinar Grafika. Jakarta. 1990. hlm 17.
- Suriansyah Murhaini. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.2014. hlm 4
- Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2018), hlm.7
- Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintah*, (Jatinangor: CV Cendikia Press, 2020), 3
- S.F Marbun. *Pokok-Pkok Hukum Administrasi Negara*, Liberty. Yogyakarta. 1997. hlm 154
- Victor R Simatupang dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1994. hlm 23.

B. Jurnal/Artikel

- Achmad..”Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kabupaten Pamekasan Tahun 2020”. *Journal of Pharmacy and Science*. Vol 5, No.2, .2020, hlm. 3
- Arnita Febriana Puryatama dan Tiyas Nur Haryani, "Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia" *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol.3, No.1, April 2020, hlm. 44.
- Azika Zena Amelia, “Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2(2) Mei 2018, hlm. 2
- Epi Septianingsih, “Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 Juni 2024, hlm. 2
- Marisca Gondokusumo, Nabbilah Amir, “Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)”. 2021, *Perspektif Hukum*, Vol. 21 No.2 November 2021 : 274, hlm. 3
- Mayang Puspita Amara, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Apotek Rafa Farma 2 Surabaya”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.3 No.1 April 2024, hlm. 92
- Poulin Puansalaing, “Implementasi otonomi daerah dalam kewenang pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011”*Let et societatis*, Vol 3. No.5 (Juni 2015). hlm 39
- Yeni Vitrianingsih, “Model Sanksi Bagi Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Menggunakan Obat Kedaluarsa”, *Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2024 hlm. 2
- Yoga Surya Ramadhan dan Fitria, “Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Pelayanan Publik Pada sektor perizinan”. *Journal admnistrasion of low*, Volume 2 Nomor 2 Juni 2021, hlm. 101

C. Web

- BPOM Jambi. 2024. Bpom Di Jambi Lakukan Pemusnahan Terhadap Puluhan Ribu Barang Bukti Serta Temuan Obat Dan Makanan Ilegal. https://jambi.pom.go.id/berita/bpom-di-jambi-lakukan-pemusnahan-terhadap-puluhan-ribu-barang-bukti-serta-temuan-obat-dan-makanan-ilegal?utm_source=chatgpt.com

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek

Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada DPMPTSP.